

**ANALISIS KOMPENSASI FINANSIAL PADA PEGAWAI HONORER  
DI KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

*Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi  
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu  
Program Studi Administrasi Negara*



**Oleh :**

**BELIA ARDILA PUTRI**  
**NPM. 200411018**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN  
2024**

**TANDA PENGESAHAN**

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 22

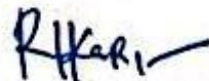
Bulan : Februari

Tahun : 2024

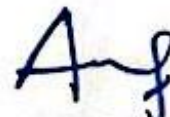
**TIM PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si  
NIDN. 1030058402



ALSAR ANDRI, S.Sos, Msi  
NIDN. 1005108901

1. EMILIA EMHARIS, S.Sos.,M.Si
2. SARJAN.M, S.Sos.,M.Si
3. SAHRI MUHARAM, S.Sos.,M.Si

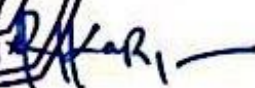
()  
()  
()

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Dekan,



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si  
NIDN. 1030058402

## TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : ANALISIS BUDAYA ORGANISASI DI KANTOR  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENYEDIAAN  
AIR BERSIH KECAMATAN KUANTAN TENGAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NAMA : DIAN FEBYOLA  
NPM : 200411021  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS : ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si  
NIDN. 1002059002

PEMBIMBING II



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si  
NIDN. 1005108901

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si  
NIDN. 1002059002

**ANALISIS KOMPENSASI FINANSIAL PADA PEGAWAI HONORER  
DI KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**ABSTRAK**

**Oleh :**

**BELIA ARDILA PUTRI**

**NPM : 200411018**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompensasi finansial pada pegawai honorer di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singing. Penelitian ini survey deskriptif kuantitatif jumlah sampel sebanyak 38 orang, Untuk Populasi dan Sampel Pegawai Honorer di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan rumus slovin untuk menentukan respondennya. Dan untuk Teknik Pengumpulan Data menggunakan Kuesioner. pengambilan sampel dilakukan secara Sampling Insidental. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik kuisisioner, observasi, dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data selanjutnya penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari tanggapan responden adalah cukup baik.

**Kata Kunci :** analisis, kompensasi finansial

**ANALISIS KONPENSASI FINANSIAL PADA PEGAWAI HONORER  
DI KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

***ABSTRACT***

***By :***

**BELIA ARDILA PUTRI  
NPM : 200411018**

*This research was conducted at the Office of the Regional Disaster Management Agency of Kuantan Singing Regency. This study aims to determine how financial compensation for honorary employees at the office of the Regional Disaster Management Agency of Kuantan Singingi Regency. This study is a quantitative descriptive survey of the number of samples of 38 people, for the population and sample of honorary employees at the office of the Regional Disaster Management Agency using the slovin formula to determine the respondents. And for Data Collection Techniques using Questionnaires. sampling is carried out by Incidental Sampling. The data collection techniques that the author uses are questionnaire, observation, documentation techniques. Data analysis is carried out by reducing data, then presenting data and finally drawing conclusions. The results showed that the results of respondents' responses were quite good.*

***Keywords :*** *analysis, financial compensaton*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring berkembangnya waktu hubungan yang berkembang dalam pengelolaan organisasi modern saat ini adalah hubungan dua arah yang seimbang, dimana sebuah organisasi akan berupaya memberikan hak yang memang seharusnya diberikan kepada pegawai dan pegawai memberikan kinerja yang maksimal untuk membantu sebuah organisasi berhasil mencapai tujuannya.

Keberadaan sumber daya manusia merupakan daya pikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan dalam diri, yang perlu digali, dibina, dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh sebuah organisasi. Pegawai menjadi modal utama dalam menunjang keberhasilan instansi pemerintah, agar pegawai mampu mempertahankan kualitas dari kinerjanya dalam sebuah organisasi maka keseimbangan hak dan kewajiban sangat diperlukan untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5 yang berbunyi :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”.

Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 10 yang berbunyi :

“1. Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP). 2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 merupakan lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri. Tentu saja upaya-upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) mesti melibatkan semua pihak-pihak yang berkepentingan demi ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.”

Seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Kuantan Singing sendiri memiliki kondisi rawan banjir, kebakaran hutan atau lahan, dan lainnya yang dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dari pemerintah serta masyarakat untuk perlindungan kehidupan dan penghidupan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan secara cepat, tanggap, sistematis, terkoordinasi, terpadu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Selanjutnya disingkat BPBD) Kabupaten Kuantan Singingi resmi terbentuk setelah ditetapkan Peraturan daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Serta Tata Kerja Badan Penanggulan Bencana Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 yang dtetapkan pada tanggal 22 Maret 2022 dan berlaku pada tanggal 01 Januari 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebelumnya, semua berkaitan hal-hal penanggulangan kebencanaan dinegeri pacu jalur tersebut berada di bawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja daerah setempat. Hadirnya BPBD paling bungsu di Riau ini, tidak hanya melengkapi perangkat yang menangani kebencanaan di seluruh Kabupaten/Kota

Riau. Tetapi juga menuntaskan perintah yang selama ini terus diupayakan, demi kelancaran dan percepatan penanganan bencana di daerah tersebut.

Oleh karena itu pemerintah merekrut pegawai honorer pada tahun 2022. Menurut website [Riauonline.co.id](http://Riauonline.co.id) tahun 2022 yang lalu Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantang Singingi Riau akan merekrut sebanyak 2700 pegawai honor. Meskipun perekrutan pegawai honorer sebagian besar tidak dilakukan transparan namun pemerintah kabupaten kembali mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2022 untuk 2700 pegawai honorer. Pengangkatan pegawai honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi calon Aparatur Sipil Negara ini yang dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara mulai formasi Tahun Anggaran 2005 sampai dengan formasi Tahun Anggaran 2012.

Hal pertama yang perlu diperhatikan segi kompensasi. Besarnya kompensasi harus disesuaikan dengan biaya hidup pada daerah tempat bekerja mereka, jika kompensasi di bawah biaya hidup maka, pegawai akan kesulitan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari yang akhirnya dapat menyebabkan kualitas kinerja pegawai menurun.

Pemerintah dan persediaan kemampuan membayar dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai dapat dipertimbangkan dengan tingkat permintaan pasar dan persediaan yang merupakan kondisi pasar saat itu harus dijadikan pertimbangan dalam penentuan tingkat upah pegawai yakni, kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas



tertentu pada instansi pemerintah atau penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat memindahkan dan memberhentikan Aparatur Sipil Negara di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Instansi adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, untuk itu kompensasi yang diberikan oleh instansi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan juga timbal balik yang sesuai terhadap kontribusi para pegawai kerja honorer di kantor BPBD Kabupaten Kuantan Singingi, dengan adanya kompensasi yang baik juga bisa meningkatkan kinerja dari para pegawai honorer tersebut. Tentu akan berdampak positif bagi kedua pihak baik itu pegawai honorer BPBD Kabupaten Kuantan Singingi dan juga kantor BPBD Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan pengamatan awal penulis dengan melakukan wawancara atau Tanya sekilas terhadap pegawai masih ada beberapa permasalahan pada di Kantor BPBD Kabupaten Kuantan Singingi khususnya terkait dengan kompensasi seperti tidak kelancarannya atau tidak tepat waktu dalam mengeluarkan gaji kepada pegawai honor, upah SPT yang diberikan tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Gaji yang diterima oleh pegawai honorer setiap bulannya sebesar Rp. 1.250.000, bahkan ada beberapa pegawai honorer yang mengeluh tidak tercukupinya kebutuhan sehari-hari dengan gaji yang diterima terutama bagi pegawai honorer yang sudah berumah tangga.

Fenomena kompensasi finansial di BPBD Kabupaten Kuantan Singingi bahwa pemerintah belum memperlihatkan komitmen yang kuat untuk memberikan kompensasi kepada pegawai honorer. Hal ini terlihat dari gaji yang belum diberikan atau dikeluarkan kepada pegawai honorer selama beberapa bulan terakhir ini.

Maka dari uraian yang disampaikan di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian : **“Analisis Kompensasi Finansial Pada Pegawai Honorer Di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut : **“Bagaimana Analisa Kompensasi Finansial Pada Pegawai Honorer Di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ?”**.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui analisa kompensasi finansial pada pegawai honorer di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama mengenai kompensasi finansial pada pegawai honorer di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- 1.4.1.1 Memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai kompensasi sehingga berguna dimasa yang akan datang.
- 1.4.1.2 Memberikan tolak ukur dan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- 1.4.1.3 Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Memberi masukan kepada pembaca dan mahasiswa tentang kompensasi finansial pada pegawai honorer di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian data yang telah peneliti lakukan melalui hasil jawaban responden menggunakan kuisioner mengenai Analisis Kompensasi Finansial Pada Pegawai Honorer di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singingi maka peneliti mengambil kesimpulan dengan melihat rata-rata tanggapan responden adalah 3,32 yang berada pada skala interval 2,62-3,40, hal ini menunjukkan bahwa rekapitulasi tanggapan responden terhadap Analisis Kompensasi Finansial Pada Pegawai Honor Di Kantor Badan penanggulangan Bencan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah Cukup Baik.

#### **6.2 Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan sebagai masukan terhadap Analisis Kompensasi Finansial Pada Pegawai Honorer di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah jika APBD Kuantan Singingi tidak sanggup untuk memberi gaji yang bisa mencukupi kehidupan sehari-hari pegawai, sebaiknya berilah gaji yang layak atau yang memanusiakan pegawai honorer atau pegawai kontrak. Dan ada beberapa saran dari peneliti yaitu, sebagai berikut:

- 6.2.1** Bagi Kepala Dinas Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar dapat lebih memperhatikan masalah Gaji ini, agar pegawai honor lebih semangat bekerja.
- 6.2.2** Bagi Kantor agar dapat meningkat kan anggaran gaji untuk pegawai honor agar kebutuhan sehari-hari mereka sedikit terpenuhi

**6.2.3** Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah Ilmu Pengetahuan dan Wawasan serta pengalaman dalam menganalisa Kompensai Finansial Pada Pegawai Honor Di Kantor Badan Penanggulangan Bencana daerah atau pun Dikantor-kantor lainnya yang ada Di Kabupaten Kuantan Singingi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Faried. 2015. *Teori dan Konsep Administrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ambarwati, Arie. 2018. *Perilaku dan Teori Organisasi*. Malang: Media Nusa Creative
- Batjo, Nurdin dan Shaleh, Mahadin. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Makassar: Aksara Timur.
- BNBP. 2019. *Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*: Bahama publisher.
- Congge, Umar. 2017. *Patalogi Administrasi Negara*. Makasar: CV Sah Media.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Irmayani, Ni Wayan Dian. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Juharni. 2015. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Makassar: CV Sah Media.
- Kacaribu, Alemina Henuk. 2020. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marfai, Aris, dkk. 2016. *Analisis Bencana Menunjuang Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nyoto. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Kristanto, Vigih Hery. 2018. *Metode Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pasalong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasalong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purnaya, I Gusti Ketut. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rahman, Mariati. 2017. *Ilmu Administrasi*. Makassar: Sah Media
- Revida, Erika. 2020. *Teori Adminitrasi Negara*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sabrina. R. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Medan: Umsu Press
- Sudaryo. Yoyo, dkk. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kompensasi Tidak Langsung Dan Lingkungan Kerja Fisik*. Yogyakarta : Andi.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Utama, Zahera Mega. 2020. *Manajmen Sumber Daya Manusia*. Jakarta Timur: UNJ Press.
- Winata, Edi. 2022. *Manajemen Sumber Daya Manusia Kompensasi Dalam Kinerja Karyawan*. Lombok Tengah. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.

### B. Jurnal

- Wisnu, Dicky. 2019. *Teori Organisasi Struktural dan Desain*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Thomi, Syaiful. 2016. *Dampak Kompensasi Bonus Terhadap Kinerja Account Officer Di Bmt Mitra Ummat Rumbia*. Jurai Siwo Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

### C. Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumentasi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 10
- Peraturan daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Serta Tata Kerja Badan Penanggulan Bencana Daerah

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Buku Pedoman Penyusunan Proposal Skripsi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Tahun 2022: Kuantan Singingi



















